



Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Ar-Raudhah Karimun Kepulauan Riau

Nurul Ajimah Ritonga¹, Merdayana², Sakdan Azwan³

¹ STIT Mumtaz Karimun

² STIT Mumtaz Karimun

³ STAI Jam'iyah Mahmudiyah

Corresponding Author:  merdayanaputridarwis@gmail.com

ABSTRACT

Pengelolaan pembiayaan di Madrasah Aliyah Ar-Raudhah Karimun memiliki kendala dalam pelaporan secara administratif pembiayaan bulanan. Ada beberapa kasus peserta didik yang buku laporan pembiayaannya belum tercatat di buku besar bendahara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengelolaan pembiayaan meliputi; perencanaan, analisis, strategi dan evaluasi pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Ar-Raudhah Karimun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara terstruktur, teknik observasi partisipatif dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) proses perencanaan pembiayaan dilakukan dengan menyusun format data isian pengajuan anggaran dari seksi pendidikan madrasah Aliyah Ar-Raudhah. (2) analisis pembiayaan dilakukan kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan kebutuhan lembaga, hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat. (3) pengembangan sistem dan pengelolaan biaya yang *akuntabel*, madrasah melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup kebutuhan madrasah dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pembiayaan dari peserta didik. (4) Evaluasi dilakukan oleh madrasah melibatkan sivitas madrasah, bendahara madrasah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan biaya.

Kata Kunci
Keywords

Manajemen, Pembiayaan, Madrasah.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dalam mutu pendidikan adalah pembiayaan. Pembiayaan kadang juga merupakan inti dari setiap permasalahan pendidikan, apalagi jika dihubungkan dengan Pembiayaan pendidikan pada swasta yang seluruhnya bersumber dari dana masyarakat walaupun sebenarnya ada bantuan dari pemerintah tetapi tidak terlalu signifikan untuk

dibuat acuan dalam penentuan kebijakan maka kualitas pendidikan tinggi swasta tentu sangat bergantung pada bagaimana manajemen pembiayaannya. Manajemen Pembiayaan yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah lembaga pendidikan untuk memajukan atau meningkatkan kualitasnya¹.

Pendidikan dikatakan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memberi bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar dapat berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon tenaga kerja. Pendidikan dipandang sebagai sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa dan membentuk karakter bangsa.

Pengelolaan pembiayaan di Madrasah Aliyah Ar-Raudhah Karimun memiliki kendala dalam pelaporan secara administratif pembiayaan bulanan. Ada beberapa kasus peserta didik yang buku laporan pembiayaannya belum tercatat di buku besar bendahara. Pembayaran yang tidak langsung dicatat secara administratif oleh bendahara. Pelaporan yang tidak ditangani oleh bendahara dan ditangani secara administratif oleh kepala TU. Pembayaran administrasi keuangan yang masih banyak belum lunas dari beberapa peserta didik di tingkatan kelas. *Auditing* akhir yang tidak rutin dilakukan yaitu secara seremonial ketika akhir bulan saja, tidak dicatat setiap Minggu. Strategi pengelolaan biaya pendidikan dilakukan secara langsung dan dirumuskan oleh kepala madrasah bersama pimpinan yayasan Ar-Raudhah.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUSPN Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan

¹ Achmad Anwar Abidin, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', Jurnal Penjaminan Mutu, 3.1 (2017), 88.

akhir yang sama, yaitu: a) peningkatan potensi SDM yang berkualitas; b) penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; c) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; d) pengefektifan dan pengefisienan penggunaan dana; e) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; f) meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka perlu ada kajian lebih lanjut terkait perencanaan, analisis kesenjangan, penyusunan strategi pengelolaan dan evaluasi biaya pendidikan dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Ar-Raudhah Karimun

Dalam kamus Webster disebutkan bahwa pengelolaan/manajemen berasal dari kata *manage* (*maneggio, Italia*), berarti mengurus, memimpin, mencapai, dan memerintah. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis, yaitu *manège* yang berarti kepemilikan kuda (dan dalam bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda). Bahasa Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur². Pengelolaan atau manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (teori modal manusia). Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah

² A. Rusdiana, *Kewirausahaan: Teori Dan Praktik*, Edisi 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 178.

mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi.

Telah diketahui bahwa peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam tempo yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia sebenarnya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan *rate of return* (manfaatnya) dari dikeluarkan untuk bersekolah dan *opportunity cost* dari bersekolah adalah penghasilan yang diterimanya bila ia tidak bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan (*return*) yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Diharapkan dari investasi ini manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada biayanya.

Suhardan menyatakan bahwa apabila seseorang menginvestasikan biaya kesempatan (uang, waktu dan tenaga) yang dimiliki untuk pendidikan, dia akan memperoleh manfaat, baik bagi dirinya dan lingkungan sekitar (sosial). Manfaat tersebut antara lain; a.manfaat individu dan sosial; b.manfaat jangka pendek dan panjang; c.manfaat terhadap antar generasi; dan mempermudah manusia dalam melakukan kerjasama dan dalam melakukan kerjasama dan persaingan. Manfaat individu mempermudah manusia dalam melakukan kerjasama dan persaingan³.

Dalam dunia pendidikan terdapat pengelolaan pembiayaan pendidikan karena pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk berjalannya sebuah lembaga pendidikan di masa sekarang yang dalam hal ini pemerintah juga mengaturnya dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan⁴. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

³ Arina Hidayati, 'Perencanaan Karir Sebagai Bentuk Investasi Pendidikan Siswa SMK (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Batang)', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25.2 (2015), 3.

⁴ Achmad Anwar Abidin, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', 88.

2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pada pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 3 (1) Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan⁵.

Adapun besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pada pemerintah sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen adalah sebesar 20% dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara pada masa tahun anggaran berjalan dan kebijakan 20% ini tidak dalam lingkup nasional semata tetapi juga dari anggaran APBD untuk propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar baik jalur sekolah maupun non sekolah sesuai PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Menurut Maretsya Soegiarto dan Heriyanto strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi pembiayaan meliputi strategi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan pada lembaga formal, diawali dengan disusunnya Visi dan Misi Sekolah, strategi perencanaan dan penyusunan RAPBS dilaksanakan melalui analisis SWOT sederhana. Strategi perencanaan pembiayaan sekolah merupakan bagian penting dari manajemen yang perlu ditentukan sesuai dengan faktor internal dan eksternal suatu perusahaan/ lembaga termasuk sekolah. Selain itu hasil dari penentuan strategi perencanaan akan berimplikasi pada strategi pelaksanaan.

Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, harus

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan* (Jakarta, 2008), pp. 1-57.

memfokuskan pada program-program yang menjadi objek biaya, supaya efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dapat tercapai. Dalam hal ini, kemampuan pengelola pembiayaan sekolah dalam menentukan strategi menjadi faktor penting. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program⁶.

Anggaran biaya selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif metode deskriptif, pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau apa adanya, metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada menemukan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembiayaan Madrasah Ar-Raudhah

Proses perencanaan kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan menyusun format data isian pengajuan anggaran dari seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang. Langkah ini dilakukan oleh kepala madrasah bersama dengan bendahara umum madrasah sebagai proses awal memunculkan

⁶ Ririn Margareta and Ismanto Bambang, 'Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Di SMP Negeri', *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4.2 (2017), 198.

kalkulasi angka besaran kebutuhan pembiayaan madrasah⁷. Dalam strategi pembiayaan, kegiatan penentuan kebutuhan pembiayaan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh madrasah. Keputusan itu menyangkut pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan pembiayaan dibuat dalam sebuah kerangka perencanaan pelayanan dan finansial yang terintegrasi dalam konteks kebijakan madrasah sebagai acuan prioritas alokasi pembiayaan madrasah.

Bendahara umum akan melaporkan pengajuan dan analisis data untuk pemenuhan pembiayaan meliputi sarana dan prasarana yaitu rehabilitasi gedung rusak, pembelian alat elektronik, barang habis pakai, anggaran belanja pegawai, perpajakan madrasah dll. Strategi yang diambil oleh lembaga khususnya bendahara umum madrasah didasarkan pada analisis kebutuhan bersama seluruh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang lainnya sehingga menghasilkan alternatif dan pilihan yang dapat diambil dan disahkan dalam kebijakan madrasah.

Analisis Pembiayaan Madrasah Aliyah Ar-Raudhah

Ketika rapat penyusunan anggaran berlangsung maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan. Hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat agar tercipta alternatif dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan anggaran pembiayaan madrasah. Bendahara akan memberikan gambaran alokasi biaya untuk mengefektifkan penggunaan alokasi anggaran pada ranah sarana dan prasarana, anggaran belanja pegawai dll. Jika alokasi pembiayaan yang ada masih mampu dalam mendukung alokasi biaya maka akan ada kebijakan dalam melanjutkan kebijakan perencanaan sebelumnya. Jika alokasi berlebihan

⁷ Sarah Sahriani, *Laporan Penyusunan Perencanaan Anggaran Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang* (Sumedang, 2018), 11.

maka akan ada pengurangan anggaran sehingga tidak terjadi surplus dalam anggaran pembiayaan madrasah Aliyah Ar-Raudhah⁸.

Dalam buku A.Rusdiana mengemukakan teori yang sama dengan mekanisme yang berbeda yaitu proses analisis ini membandingkan antara pembiayaan yang dibutuhkan dengan biaya yang sedang digunakan dalam kegiatan pelayanan. Yang diidentifikasi diantaranya yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan layanan, pembiayaan yang ada, pembiayaan yang berlebih untuk penyediaan pelayanan, pembiayaan yang harus dihapuskan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan di sekolah.

3. Strategi Pembiayaan Madrasah Aliyah Ar-Raudhah

Untuk mengembangkan sistem dan pengelolaan biaya yang *akuntabel* madrasah Aliyah Ar-Raudhah Karimun melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup kebutuhan madrasah dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan biaya dari peserta didik, pemeliharaan biaya sarana dan prasarana dilakukan dalam kurun waktu satu kali dalam satu semester sehingga memperkecil kemungkinan kerusakan dan penghapusan dari sarana prasarana tersendiri dan penghapusan yang sifatnya sudah tidak dapat di perbaiki.

Suatu pendekatan terintegrasi terhadap perencanaan dan manajemen pembiayaan memungkinkan entitas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas secara efektif dan efisien. Strategi pengelolaan pembiayaan akan menentukan wewenang dan tanggung jawab untuk tindakan sehubungan dengan kegiatan pengelolaan pembiayaan madrasah. Strategi pengelolaan pembiayaan infrastruktur dan lahan dengan mengidentifikasi dan menanggapi sejumlah komponen lembaga internal dan eksternal yang dihadapi manajemen. Strategi pengelolaan strategi manajemen meliputi; berasal dari kebijakan, konsisten dengan kebijakan lembaga, mengidentifikasi dan

⁸ Bendahara Madrasah, *Laporan Hasil Rapat Penyusunan Anggaran Madrasah TA. 2018/2019* (Sumedang, 2018), 13.

mempertimbangkan *stake holder* madrasah. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber- sumber pendapat pendidikan saja, namun lebih pada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan- tujuannya.

Evaluasi Pembiayaan Madrasah Aliyah Ar-Raudhah

Evaluasi dilakukan oleh Madrasah Aliyah Ar-Raudhah melibatkan sivitas madrasah baik bendahara madrasah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan pembiayaan. Bentuk laporan pembiayaan dituangkan dalam pelaporan BPMU untuk kemudian dilaporkan kepada seksi pendidikan madrasah kabupaten Karimun. Rapat internal evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan pada akhir semester di madrasah dengan mekanisme pelaporan dari bendahara baik secara teknis laporan buku besar yang meliputi, pemasukan, pengelolaan, pembayaran, pengeluaran pembiayaan madrasah. Pelaksanaan dilakukan secara musyawarah dan menghasilkan laporan pembiayaan yang sudah siap di sampaikan ke yayasan⁹.

Evaluasi atas pembiayaan yang telah ada dilakukan untuk menentukan apakah kinerja pembiayaan tersebut memadai untuk mendukung strategi penyediaan pelayanan mencakup evaluasi atas kinerja pembiayaan. Kinerja pembiayaan ditinjau ulang/*review* secara rutin dengan perbandingan praktek terbaik untuk mengidentifikasi pembiayaan yang kinerjanya buruk yang membutuhkan biaya terlalu tinggi untuk dimiliki atau dioperasikan

KESIMPULAN

(1) Proses perencanaan kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan menyusun format data isian pengajuan anggaran dari seksi pendidikan Madrasah Aliyah Ar-Raudhah Karimun. (2) Ketika rapat penyusunan anggaran

⁹ Bendahara Madrasah, *Laporan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang* (Sumedang, 2018), 13.

berlangsung maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan. Hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat agar tercipta alternatif dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan anggaran biaya madrasah. (3) Untuk mengembangkan sistem dan pengelolaan biaya yang *akuntabel* Madrasah Aliyah Ar-Raudhah Karimun melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup kebutuhan madrasah dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pembiayaan dari peserta didik. (4) Evaluasi dilakukan oleh Madrasah Aliyah Ar-Raudhah melibatkan sivitas madrasah baik bendahara madrasah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan biaya. Bentuk laporan pembiayaan dituangkan dalam pelaporan BPMU untuk kemudian dilaporkan kepada seksi pendidikan Madrasah Aliyah Karimun

REFERENCES

- Abidin, Achmad Anwar, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3 (2017)
- Dewi, Rizka Nur Rachma, 'Analisis Investasi Sumber Daya Manusia Di Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2005-2009)', *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6 (2017)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Wijaya, David.2009. *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan. Jurnal Pendidikan Penabur – No.13/Tahun ke-8/Desember 200.*
- Tilaar. 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang (2007). *Analisis kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar.* Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Bandung : Fokus Media.

Zaini, M. F., & Syafaruddin, S. (2020). The Leadership Behavior of Madrasah Principals in Improving the Quality of Education in MAN 3 Medan. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(2), 95-106.
<https://doi.org/10.25217/ji.v5i2.649>

Zaini, M. F., Hidayat, R., Fadhli, M., & Pasaribu, M. H. (2020). Manajemen Mutu Pendidikan: Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 1(1).